

## Surat Keputusan Pencabutan SIP Apoteker

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan NIB, izin lokasi, izin usaha, izin komersial atau operasional	Wajib
2	Scan Asli KTP Pemohon	Wajib
3	Scan Formulir permohonan pencabutan Izin Apotek yang ditandatangani oleh Apoteker	Wajib
4	Scan Surat Izin Praktik Apoteker	Wajib
5	Scan Surat Izin Apotek	Wajib
6	Scan Daftar sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang terdapat di Apotek	Wajib
7	Scan Daftar perlengkapan administrasi yang terdapat di sarana (termasuk jumlah resep selama Apotek beroperasi)	Wajib
8	Scan Laporan SIPNAP 3 (tiga) bulan terakhir	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Undang-undang Obat Keras (St 1937 Nomor 541);
2	Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
3	Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4	Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6	Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
7	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
9	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
10	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
11	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
12	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
13	"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah"
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
15	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
17	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
18	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

19	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
21	Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
22	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
23	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

**Pengurusan dan Biaya :**

No	Pengurusan	Biaya
1	6 (Enam) Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Dinyatakan Lengkap Dan Benar.	Rp. 0,00